KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Kunker fiktif. PDIP anggap ada perbedaan persepsi
Tanggal : Rabu, 18 Mei 2016
Surat Kabar : Suara Karya
Halaman : 2

KUNKER FIKTIF

PDIP Anggap Ada Perbedaan Persepsi

JAKARTA (Suara Karya): Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR Hendrawan Supratikno mengatakan, ada perbedaan persepsi antara fraksi di DPR dengan BPK dalam sistem pelaporan kunjungan kerja ke daerah. Selama ini, sesuai aturan yang berlaku, anggota DPR hanya melaporkan hasil kunjungan berbasis kegiatan. Sedangkan BPK mengasumsikan laporan harus dibuat dengan berbasis anggaran.

"Di situlah salah persepsi terjadi. Karena anggota DPR mengikuti aturan yang berlaku makanya laporan itu dibuat per kegiatan. Sementara BPK mengiranya berdasarkan anggaran dengan sistem pork barel seperti di Amerika (Serikat)," ujar Hendrawan di Jakarta, Selasa (17/5).

Hendrawan melanjutkan, jika laporan dibuat berbasis anggaran, maka laporan akan menjadi sangat banyak. Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR akan kesulitan mengaturnya.

"Masalah ini aslinya sudah selesai, karena laporan kunker yang dibuat anggota DPR sudah sesuai aturan. Sistem pelaporan yang digunakan saat ini namanya lamsam, yakni pelaporan secara gelondongan. Tinggal yang belum lengkap, dilengkapi saja," ujarnya.

Dia menambahkan, memang ada anggota yang laporannya kurang lengkap. Namun, ia mengatakan, secara sistem pelaporan sudah benar.

Sebelumnya, BPK menemukan potensi kerugian negara sebesar Rp 945.465.000.000 dalam kunjungan kerja perseorangan yang dilakukan oleh anggota DPR RI. KPK akan mengusut masalah tersebut jika menerima hasil audit BPK.

Modus perjalanan kerja fiktif terbilang jamak, baik di DPR maupun di kementerian/lembaga. Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri mengatakan, perjalanan kerja fiktif sudah pernah terjadi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2010. Dari penelitian ICW, ditemukan perjalanan kerja fiktif sebesar Rp 13 Miliar dari total anggaran Rp 17 miliar.

Ia mengatakan, perjalanan kerja fiktif biasanya dilakukan dengan modus seperti tiket pesawat dan kamar hotel fiktif.

Hendri menyontohkan, biasanya seorang pegawai bisa pergi ke dua penerbangan yang berbeda pada saat bersama.

Dari segi penginapan, tidak jarang pegawai tersebut 'kongkalingkong' dengan pihak hotel untuk membuat kuitansi penginapan fiktif.

"Ada yang seharusnya kunjungannya dua minggu, ternyata hanya empat hari. Tapi kuitansi yang ditulis full dua minggu," katanya. **(adi)**